



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
 LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
 UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NELSON AMBARITA
2. Jabatan : AUDITOR UTAMA
3. NHK : 189187

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.512.280.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 608 m ² /90 m ² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah Seluas 600 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 531.280.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m ² /173 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.475.000.000		
4. Tanah Seluas 360 m ² di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 141.000.000		
5. Bangunan Seluas 95 m ² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m ² /150 m ² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000		
7. Tanah Seluas 330 m ² di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	242.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	440.651.518
F. HARTA LAINNYA	Rp.	285.709.651
Sub Total	Rp.	4.480.641.169
III. HUTANG	Rp.	1.000.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.480.641.169



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.